

PENGELOLAAN SAPI POTONG BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF EKOLOGI POLITIK



SITI NURLAELAH
P0100311413

ILMU PERTANIAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014

PROPOSAL DISERTASI

**PENGELOLAAN SAPI POTONG BERKELANJUTAN
DALAM PERSPEKTIF EKOLOGI POLITIK**

Disusun dan Diajukan
Oleh

**SITI NURLAELAH
P0100311413**

Menyetujui
Komisi Penasehat

Prof. Dr. Ir. M. Saleh S. Ali, M.Sc
Promotor

Prof.Dr.Ir.Ahmad Ramadhan Siregar, MS
Ko-Promotor

DR.Ir.Imam Mujahidin Fahmid, MT.Dev
Ko-Promotor

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Plt, Ketua Program Studi S3
Ilmu Pertanian,

Prof.Dr.Syamsul Bachri, SH,MH

Prof.Dr.Syamsul Bachri, SH,MH

PENGESAHAN SEMINAR USULAN PENELITIAN

**PENGELOLAAN SAPI POTONG BERKELANJUTAN
DALAM PERSPEKTIF EKOLOGI POLITIK**

Diajukan oleh

**SITI NURLAELAH
P0100311413**

*Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk melaksanakan
seminar usul penelitian*

Menyetujui
Tim Promotor

Prof. Ir. M. Saleh S. Ali, M.Sc, Ph.D

Promotor

Tanggal:

Prof.Dr.Ir.Ahmad Ramadhan Siregar, MS

Ko-Promotor

Tanggal:

DR.Ir.Imam Mujahidin Fahmid, MT.Dev

Ko-Promotor

Tanggal:

Ketua Program Studi S3
Ilmu Pertanian, Pelaksana Tugas

Prof.Dr.Syamsul Bachri, SH,MH

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Ekologi Politik	7
B. Pengelolaan Sapi Potong	9
C. Keberlanjutan Usaha	11
D. Teori Kompleksitas	12
E. Teori Aktor	14
F. Kerangka Pikir Penelitian	17
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	18
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian, Paradigma Penelitian	18
Paradigma Penelitian	18
B. Pengelolaan Peran Peneliti	18
C. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	19
D. Sumber Data	20
E. Teknik Pengumpulan Data	21
F. Teknik Analisis Data	21
DAFTAR PUSTAKA	23

DAFTAR TABEL

No.		Halaman
1.	Konsep-konsep utama dalam teori aktor-jaringan	15
2.	Informasi Sumber Data dari Informan	20

DAFTAR GAMBAR

No.		Halaman
1.	Kerangka Pikir Penelitian	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan daging dunia ada tahun 2012 sebesar 30 juta ton atau sebesar 42,5 kg per kapita. hal ini merupakan proyeksi Badan Pangan Dunia - FAO. Sedangkan untuk negara-negara berkembang per kapita sebesar 32,7 kg tetapi pada tahun yang sama terjadi penurunan untuk negara-negara industri dari 81 kg menjadi 79 kg per kapita (Syahyuti, 2013). Permintaan daging sapi nasional pada tahun 2013 sebesar 540.000 ton sedangkan daging sapi yang tersedia hanya sebesar 430.000 ton (*Kompas, 30 Desember 2013*), berarti ada kekurangan daging sekitar 20%. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya impor untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Pada tahun 2014 mencapai 593.040 ton (*Tribunnews.com, Senin, 21 Juli 2014*), hal ini merujuk pada kenaikan jumlah konsumsi daging per kapita per tahun sebesar 2,2 kg pada tahun 2013 menjadi 2,36 kg pada tahun 2014. Berdasarkan asumsi bahwa daging yang tersedia jumlahnya tetap maka terjadi kekurangan sekitar 28%. Hal ini yang menjadi acuan untuk meningkatkan impor daging sapi dan bakalan.

Isu paling mendasar saat ini adalah swasembada¹ daging sapi dan kerbau yang diharapkan tercapai pada tahun 2014. Namun masih terjadi

¹ Konsep swasembada daging sapi adalah terpenuhinya konsumsi daging sapi masyarakat yang berasal dari sumber daya lokal sebesar 90%. Swasembada daging sapi yang diinginkan akan

polemik dengan adanya impor sapi bakalan maupun daging. Dengan fakta seperti ini haruslah disikapi dengan bijak, disatu sisi pemerintah mengeluarkan kebijakan impor dan disisi lain seharusnya peternak diberdayakan untuk keberlanjutan sapi potong. Peran pemerintah selama ini adalah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung swasembada daging, namun disisi lain tidak didukung oleh sosial budaya, ekonomi, teknologi sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sapi potong.

Selain swasembada yang diharapkan akan menjadi acuan peningkatan populasi tetapi disisi lain harus ditunjang oleh ketersediaan lahan pakan dan infrastruktur pendukung baik berupa pembiayaan maupun kebijakan terhadap keberpihakan ke peternak. Rendahnya produktifitas dikarenakan pengelolaan peternakan sapi potong masih bersifat tradisional yang bercirikan; jumlah kepemilikan ternak rendah dengan rata-rata kepemilikan hanya 4 ekor/rumah tangga (Dirjen Peternakan dan BPS, 2011), pengetahuan peternak masih rendah dan anggapan peternak bahwa ternak sapi merupakan tabungan dan usaha ternak merupakan pekerjaan sampingan. Menurut Nunes, dkk (2014), luas

bersifat berkelanjutan, artinya pencapaian swasembada akan didahului oleh swasembada yang *on trend*, yang selanjutnya akan menuju kearah swasembada sepenuhnya sehingga ketahanan pangan bertumpu pada sumberdaya lokal. Konsep swasembada juga dimaksudkan untuk pemberdayaan peternak dan ternak lokal, sehingga kegiatan-kegiatan teknis menyangkut peningkatan populasi dan produksi ternak yang dikhususkan pada ternak asli dan lokal Indonesia. Salah satu prinsip Program Swasembada Daging Sapi adalah dapat dihasilkannya daging yang memenuhi persyaratan teknis yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Aman berarti daging tersebut terbebas dari berbagai cemaran dan residu, sehat berarti bebas dari potensi serangan penyakit, utuh berarti tidak ada percampuran dengan daging lainnya dan halal memenuhi persyaratan kaidah-kaidah agama Islam karena mayoritas masyarakat menganut agama Islam (Anonim b, 2011).

lahan, tingkat pendidikan, persepsi petani terhadap lingkungan akan berdampak pada pengelolaan yang bersifat bisnis. Selanjutnya Taryn, dkk (2014) menyatakan bahwa kepemilikan lahan mempengaruhi skala produksi.

Udo, dkk (2011), menyatakan bahwa Intensifikasi produksi ternak secara luas sangat dianjurkan karena dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat serta berkontribusi untuk meningkatkan mata pencaharian rumah tangga pedesaan. Bernués, dkk (2011), keberlanjutan sistem peternakan (*livestock farming system = LFS*) menjadi isu mendasar tentang perubahan iklim, dinamika populasi dan kualitas layanan agro-ekosistem sehingga diperlukan suatu alat analisa. Namun alat analisa LFS ini tidak dapat dianalisis secara menyeluruh tetapi harus dipisahkan ketika akan menganalisis setiap aspek keberlanjutan.

Pengelolaan peternakan yang berkelanjutan memerlukan penyelesaian secara kompleks, dimana keseluruhan aspek baik sosial ekonomi, budaya, teknologi dan ekologi politik. Gow David D (1987) telah memaparkan dalam penelitian ilmiah mengenai keberlanjutan, dimana masalah yang ditimbulkan haruslah diselesaikan secara kompleksitas, dimana keberlanjutan haruslah dilihat secara holistik untuk membahas isu-isu kunci terutama mengenai kebijakan, kepemilikan, aktor yang terlibat, peran dan partisipasi masyarakat yang akhirnya peran dari teknologi itu sendiri.

Program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu disertai oleh anggaran yang jumlahnya tidak sedikit, baik melalui APBN maupun APBD. Anggaran ini digelontorkan kepada kelompok-kelompok ternak dengan berbagai macam pertimbangan teknis. Anggaran yang sampai dalam menunjang program swasembada daging ini tidak hanya melibatkan satu departemen tetapi akan saling terkait dengan departemen lain. Tahun 2014 yang dialokasikan dari APBN 2009-2014 cukup besar, yaitu Rp 18,7 triliun. Pengelolaan sapi potong ini menjadi sangat politis dikarenakan banyaknya kepentingan-kepentingan dari berbagai pihak atau aktor/pelaku dalam mewujudkan peningkatan populasi sapi potong. Aktor yang terlibat akan saling berinterkoneksi.

Upaya pemerintah tersebut tidak semata-mata langsung berhasil tetapi banyak faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal maupun eksternal dari kebijakan itu sendiri. Pengelolaan sapi potong berkelanjutan haruslah dilihat secara kompleks artinya faktor internal (kriteria sosial budaya, ekonomi, teknologi, ekologi dan sebagainya) dan eksternalnya (kebijakan pemerintah) haruslah berjalan bersama. Begitu kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan sapi potong, maka salah satu pendekatan yang perlu dilakukan adalah melihatnya dari perspektif ekologi politik.

Ekologi politik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor politik, ekonomi dan sosial dengan isu-isu lingkungan dan perubahan. Ekologi politik berbeda dari studi ekologi apolitis oleh politisasi

isu-isu lingkungan dan fenomena. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kebijakan yang *top down* artinya kepentingan ini digulirkan ke tingkat bawah untuk direalisasikan. Sementara pihak lain seperti peternak sebagai objek kegiatan akan melaksanakan kegiatan dan aktor-aktor lain yang terlibat dalam kegiatan ini seperti pedagang, pemerintah, pihak swasta, lembaga institusi, legislatif, pendamping teknis, dan sebagainya memiliki sumberdaya (Resource), organisasi (organization) dan aturan-aturan (norms) yang telah menjadi bagian dari masing-masing aktor dalam pengelolaan sapi potong. Untuk itu penting dilakukan penelitian mengenai pengelolaan sapi potong berkelanjutan dalam perspektif ekologi politik.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pengelolaan sapi potong berkelanjutan menurut para aktor?
2. Bagaimana para aktor berinterkoneksi dalam pengelolaan sapi potong berkelanjutan?
3. Bagaimana tipologi pengelolaan sapi potong akibat adanya interkoneksi dan kontestasi para aktor.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum mengkaji ekologi politik pengelolaan sapi potong berkelanjutan berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pengelolaan sapi potong menurut para aktor.
2. Menganalisis interkoneksi yang terjadi antar aktor dan dampak yang ditimbulkan terhadap kontestasi para aktor.
3. Menemukan tipologi model pengelolaan sapi potong.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai ekologi politik sapi potong berkelanjutan ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi bagi pengambil kebijakan mengenai pengelolaan sapi potong menurut para aktor yang terlibat.
2. Sebagai bahan informasi dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan kebijakan mengenai pengelolaan sapi potong berkelanjutan.
3. Menjadi bahan informasi tipologi model pengelolaan sapi potong.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Ekologi Politik

Ekologi politik berkembang sebagai sebuah pendekatan baru terhadap interaksi manusia dan lingkungan dalam perkembangan wacana pada tahun 1990-an. Meskipun sebenarnya menurut pengamatan Jon Schubert, ekologi politik telah muncul dalam sejumlah studi sejak tahun 1970-an, namun saat itu istilah tersebut belum digunakan. Sebelum ekologi politik muncul, Schubert mencatat bahwa terlebih dahulu berkembang ekologi kultural yang sumbernya ditarik dari antropologi. Ekologi kultural ini berusaha mengkaji proses adaptasi budaya dan masyarakat terhadap lingkungan (Falahudin Irman, 2013).

Keberlanjutan di tingkat global hampir selalu tergantung pada penanganan masalah-masalah lokal secara konsekuen – apakah masalahnya bersifat ekologis, sosial atau ekonomis – ini belum membantu menunjukkan jalan menuju keberlanjutan pada era ini dimana majunya teknologi telah mengubah makna ‘lokal’ itu maupun bentuk hubungan antara situs-situs lokal. “Kejeniusan” kapitalisme adalah bahwa kapitalisme tidak hanya menciptakan realitas keterkaitan yang baru ini, tapi juga membantu mengaturnya secara sungguh-sungguh dan efisien. Sampai kini, kaum ekologis politik hanya mampu mendokumentasikan proses ini tapi belum memulai proses memformulasi sebuah jalan alternatif yang realistis (Arsel, 2009).

Ekologi politik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor politik, ekonomi dan sosial dengan isu-isu lingkungan dan perubahan. Ekologi politik berbeda sudut pandang dari ekologi apolitik oleh politisasi isu-isu lingkungan dan fenomena. Pengertian secara luas oleh kalangan akademik bahwa studi ekologi politik mengintegrasikan ilmu-ilmu sosial ekologi dengan ekonomi politik (Peet dan Watts, 1996). Dalam tulisan Robbins (2012), bahwa topik-topik seperti degradasi dan marginalisasi, konflik lingkungan, konservasi dan pengendalian, identitas lingkungan dan gerakan sosial serta objek politik dan aktor yang merupakan narasi dominan dalam ekologi politik. Hal ini merupakan kutipan dari pengertian ekologi politik dan tujuan utama yang dikemukakan oleh Cockburn and Ridgeway pada tahun 1979 mengenai degradasi dan marginalisasi, Blaikie and Brookfield tahun 1987 mengenai perubahan lingkungan, Greenberg and Park tahun 1994 mengenai ilmu sosial yang berhubungan dengan manusia ditinjau dari kompleksitas, Peet and Watts pada tahun 1996 tentang ekologis dan ilmu sosial, Hempel tahun yang sama tentang tindakan masyarakat dalam menghadapi degradasi lingkungan, Watts tahun 2000 tentang konflik lingkungan terutama mengenai kekuasaan, pengetahuan dan penerapannya, serta Stott dan Sullivan tentang dimensi politik.

B. Pengelolaan Sapi Potong

Pengelolaan sapi potong merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan peternakan berkelanjutan khususnya dalam penyediaan daging. Menurut Rohmad (2011), bahwa melalui kemajuan teknologi khususnya teknologi biologis dan kimiawi yang disebut sebagai revolusi hijau (*green revolution*), telah membawa perubahan besar baik di bidang pertanian maupun pada ekosistem secara keseluruhan. Segitiga produksi menggambarkan segitiga sama sisi yang merupakan aspek paling penting dalam budidaya peternakan. Ketiga aspek tersebut adalah *Breeding* (pembibitan), *Feeding* (pakan) dan *Management* (tatakelola usaha). Pengelolaan sapi potong yang akan berujung pada produksi daging merupakan hal yang terpenting untuk mencapai swasembada daging.

Secara genetik sapi potong sangat mudah beradaptasi terhadap lingkungan tropis. Ternak potong khususnya sapi potong masih digunakan sebagai ternak kerja bukan sebagai penghasil daging saja. Hal ini yang membuat ternak sapi potong masih berskala rumah tangga dengan jumlah kepemilikan yang masih rendah. Namun disisi lain keberadaan sapi potong akan meningkatkan status sosial seseorang, karena harga sapi yang cukup mahal dibandingkan dengan hasil panen sawah yang dimiliki per rumah tangga sekitar 0,25 Ha.

Negara-negara berkembang dari belahan bumi selatan memiliki kesamaan dalam hal kondisi iklim dan pertanian dan ternak adalah spesies ternak paling penting di negara-negara - yang mengarah ke

bidang-bidang yang sama dan kesempatan mengenai produksi sapi potong. Peningkatan permintaan daging di negara berkembang menawarkan peluang pasar yang besar bagi produsen ternak. Jika produktivitas petani sapi dapat ditingkatkan ke tingkat komersial, mungkin memiliki potensi untuk mengatasi kemiskinan di negara ini berbasis pertanian. (Scholtz, dkk. 2011).

Boediyana (2014) menyatakan, bahwa dalam industri sapi potong terdapat beberapa permasalahan ataupun kendala untuk membangun industri peternakan sapi potong yang tangguh di tanah air, antara lain: (1) sampai saat ini dapat diindikasikan bahwa industri hulu yang ada di tanah air sama sekali sangat lemah. Besar dan kecenderungan meningkatnya jumlah sapi bakalan dan juga volume daging sapi yang diimpor merupakan indikasi bahwa sumber sapi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan daging dalam negeri, (2) saat ini tidak memiliki data riil tentang populasi sapi di tanah air kita. Ada keraguan bahwa angka populasi yang ada saat ini lebih tinggi dari realitas. Ini yang sering menyebabkan bias dalam proses pengambilan kebijakan oleh berbagai pihak, (3) masih belum adanya persepsi yang sama dari para stakeholder dalam industri sapi potong. Hal ini berimplikasi tidak adanya derap langkah yang sama untuk membangun industri peternakan yang tangguh di tanah air, (4) ada implikasi kekeliruan menafsirkan otonomi daerah dari semua pihak yang berakibat terjadinya ekonomi biaya tinggi dalam usaha sapi potong. Otonomi daerah yang seharusnya diartikan juga sebagai

instrumen untuk menggali potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dalam prakteknya justru sebaliknya. Selain daripada itu terdapat beberapa hal lain yang menyebabkan terjadinya ekonomi biaya tinggi dalam pengembangan usaha sapi potong, (5) semakin melemahnya penegakan hukum, disinyalir telah mendorong keberanian beberapa pengusaha memasukkan daging secara illegal dari negara-negara yang secara perundangan tidak diijinkan karena belum bebas dari PMK (penyakit mulut dan kuku). Hadirnya daging dengan harga yang sangat murah dibawah harga daging sapi lokal ataupun sapi hasil penggemukan usaha feedlot dalam waktu cepat atau lambat akan memukul industri sapi potong dalam negeri.

C. Keberlanjutan Usaha

Prinsip untuk daging berkelanjutan yang berlaku untuk produsen utama di semua wilayah di dunia. Penerapan prinsip-prinsip ini oleh produsen daging sapi harus memastikan produksi yang efisien aman, daging sapi berkualitas tinggi, dengan cara yang melindungi dan meningkatkan lingkungan alam, kondisi sosial dan ekonomi petani, karyawan dan masyarakat lokal, dan menjaga kesehatan dan kesejahteraan sapi potong (SAI, 2013). Selanjutnya Grace (2014) menyatakan bahwa peternakan benar-benar berkelanjutan memerlukan penggunaan sistem berbasis padang rumput. Hewan padang rumput-dibesarkan berkeliaran bebas di lingkungan alami mereka di mana mereka

bisa makan rumput bergizi dan tanaman lain dan tubuh mereka diadaptasikan untuk dicerna. Selain secara dramatis meningkatkan kesejahteraan hewan ternak, penggembalaan juga membantu mengurangi kerusakan lingkungan. Tantangan utama untuk pembangunan berkelanjutan umat manusia adalah ketahanan pangan, perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati. Secara khusus, produksi ternak dan meningkatnya permintaan untuk daging, telur, susu dan produk susu telah menyebabkan beberapa masalah lingkungan yang merupakan ancaman besar bagi keamanan pangan. Berbagai bentuk produksi ternak memiliki dampak yang berbeda pada sumber daya alam dan interaksi *supply-demand* tampaknya menjadi faktor kunci untuk menemukan solusi yang efektif dan efisien untuk tantangan global ini.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Suyitman, dkk (2009), menyatakan bahwa keberlanjutan diukur dengan menggunakan metode RAP-BANGKAPET menunjukkan dimensi ekologi, infrastruktur-teknologi dan hukum dianggap kurang berkelanjutan sedangkan dari dimensi ekonomi dan sosial budaya dianggap cukup berkelanjutan pada wilayah berbasis peternakan dalam pengembangan kawasan agropolitan.

D. Teori Kompleksitas

Kehidupan yang beragam berawal dari sesuatu yang sederhana. Kehidupan manusia berkembang secara phylogenic, dimana kita berkembang dari sesuatu yang diwariskan secara genetik, sedangkan

secara ontogenic kita berkembang lebih cepat dari proses interaksi. Model perkembangan ini yang membuat kita menjadi makhluk yang kompleks secara personal maupun sosial (Rudicahyo, 2013). Menurut Demitrov (2003) dalam Pohan (2011), bahwa kompleksitas merupakan kajian atau studi terhadap sistem kompleks, kata “kompleksitas” berasal dari bahasa latin *complexice* yang artinya ‘totalitas’ atau ‘keseluruhan’, sebuah ilmu yang mengkaji totalitas sistem dinamik secara keseluruhan.

Sistem kompleks merupakan fenomena/perilaku alam yang melahirkan wilayah baru yang sulit diselesaikan dengan menggunakan metode konvensional baik bersifat analitik maupun numerik, hal ini disebabkan adanya sensitivitas yang tinggi dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam teori *chaos* terdapat suatu istilah *butterfly effect* yang menggambarkan sistem kompleks. *Butterfly effect* ini menceritakan bahwa kepakian sayap kupu-kupu di hutan Brazil beberapa bulan dapat menyebabkan badai tornado di daerah Texas. Hal ini melukiskan bahwa dari perubahan yang sangat kecil dapat menyebabkan perubahan yang sangat besar (Sefria, 2011).

Komunitas riset telah mengusulkan teknik untuk mengukur tiga jenis kompleksitas sistem: (1) kompleksitas struktural, yang mengukur kompleksitas yang dihasilkan dari interkoneksi fisik komponen; (2) kompleksitas fungsional, yang mengukur kompleksitas yang dihasilkan dari interkoneksi fungsi sistem dan (3) kompleksitas organisasi, yang

mengukur interkoneksi kontrak dari organisasi yang berbeda mengembangkan sistem.

Sistem sosial disusun oleh individu-individu yang memiliki sifat, cita-cita, keinginan sendiri karena terdapat hubungan mikro-makro dalam level hirarki masyarakat sehingga sistem sosial ini dianggap sistem kompleks. Dalam sebuah sistem yang kompleks ada interaksi dan hubungan antar aktor dalam elemen sosial. Interaksi antara agen penyusun sistem sosial menghasilkan pola lain yang membrojol (*emerged*) dalam sistem. Secara sederhana dapat didefinisikan bahwa faktor membrojol adalah efek dalam skala besar dari agen-agen yang berinteraksi secara lokal di dalam sistem (Situngkir, 2011).

Teori chaos adalah teori yang menjelaskan dinamika yang kompleks dari sistem awalnya. Walaupun berlangsung secara acak dan dapat ditentukan secara matematika, namun sistem chaotik mengikuti aturan alam yang merupakan peristiwa acak (Kusmarni, 2008).

E. Teori Aktor

Teori aktor jaringan pertama kali dikembangkan oleh Michael Callon pada tahun 1986 dan Bruno Latour pada tahun 1987. Para ilmuwan mencapai dukungan orang lain mengenai proposisi tentang fakta ilmiah dan bagaimana kekuasaan dan sumber daya diperoleh. Penelitian yang dilakukan oleh González, dkk (2012), menyatakan bahwa para peneliti cenderung menyederhanakan investigasi yang disebut "*punctualization*",

oleh karenanya dalam hasil penelitiannya membuat konsep-konsep kunci dalam aktor – jaringan pada tabel 2.

Menggunakan pendekatan ANT untuk menganalisis pelaksanaan proyek memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas yang terkait dengan proses ini.

Tabel 1. Konsep-konsep utama dalam teori aktor-jaringan

Konsep	Defenisi
Aktor	Manusia dan aktor bukan manusia seperti artefak teknologi
Aktor-jaringan	Aktor yang terkait dalam jaringan heterogen kepentingan sejajar, termasuk masyarakat, organisasi dan konsep
Translasi	proses penyalarsan kepentingan dari beragam rangkaian aktor dengan kepentingan aktor fokus dengan tujuan memobilisasi dukungan
Inskripsi	Proses penciptaan artefak yang akan menjamin perlindungan kepentingan tertentu
Problematisasi	Saat pertama translasi dimana aktor mendefinisikan identitas dan kepentingan aktor-aktor lain yang konsisten dengan kepentingan sendiri dan menetapkan dirinya sebagai “ <i>Obligatory Passage Point</i> ” dan sangat diperlukan
Kepentingan (Interesement)	Saat kedua translasi yang melibatkan negosiasi dengan pelaku untuk menerima definisi aktor vokal
Enrolment	Saat ketiga translasi, dimana aktor-aktor lain dalam jaringan menerima atau mendapatkan selaras dengan kepentingan yang ditetapkan bagi mereka oleh aktor vokal

Mobilisasi	Ketika salah satu solusi mendapatkan penerimaan yang lebih luas dan jaringan yang lebih besar dibuat
Obligatory Passage Point	Situasi yang harus terjadi untuk semua aktor untuk dapat mencapai kepentingan mereka seperti yang didefinisikan oleh aktor vokal
Ireversibilitas	Tingkat dimana tidak mungkin untuk kembali ke titik di mana kemungkinan alternatif sudah ada

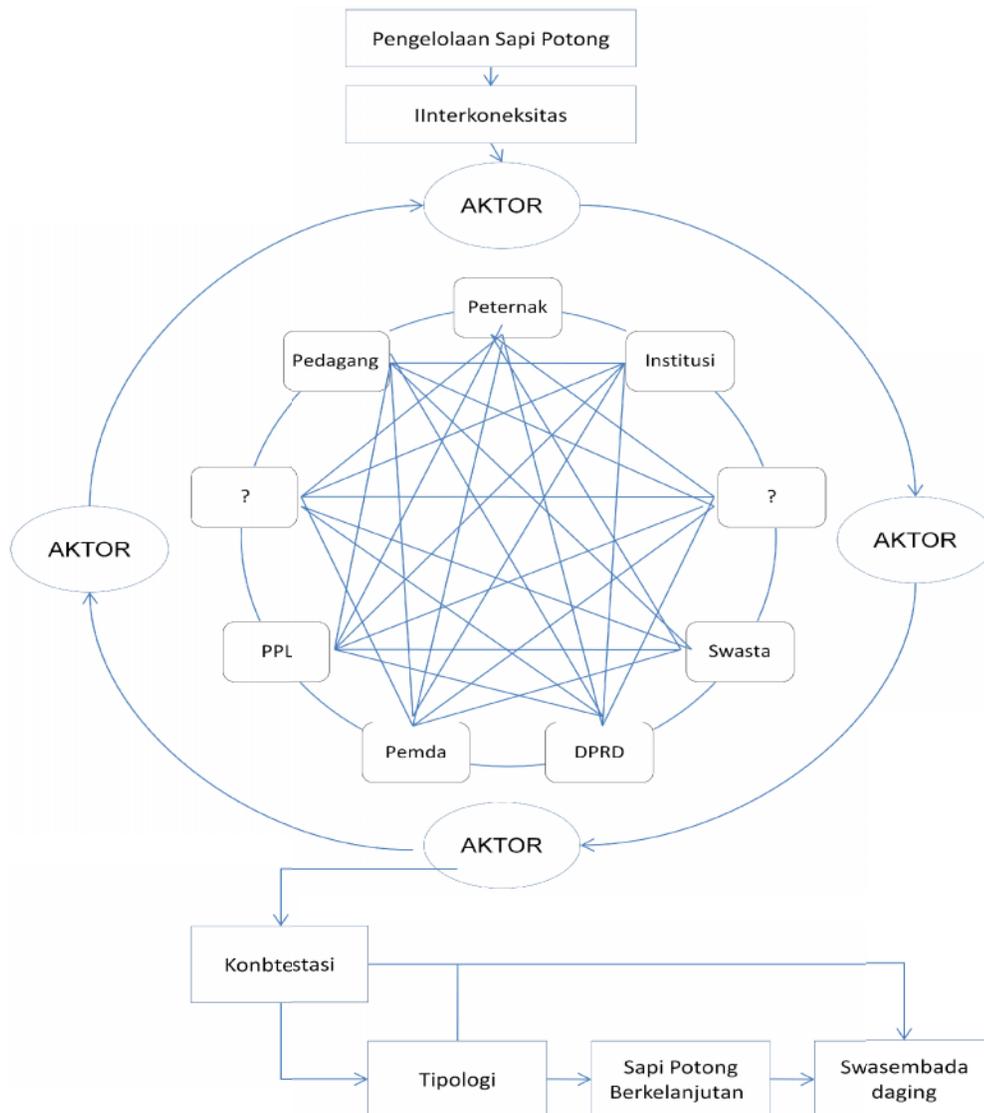
Raymond L. Bryant dan Sinéad Bailey telah mengembangkan tiga asumsi mendasar dalam pendekatan aktor dari sisi ekologi politik yaitu:

- 1) Biaya dan manfaat yang terkait dengan perubahan lingkungan yang tidak merata. Perubahan lingkungan tidak mempengaruhi perbedaan politik, sosial, dan ekonomi untuk pendistribusian.
- 2) Distribusi yang tidak merata akan memperkuat atau mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Dalam asumsi ini, ekologi politik berjalan ke ekonomi politik yang melekat sebagai "perubahan dalam kondisi lingkungan harus mempengaruhi politik dan ekonomi status quo".
- 3) Distribusi yang tidak merata biaya dan manfaat akan memperkuat atau mengurangi ketidaksetaraan yang sudah ada yang berimplikasi politik dalam hal hubungan kekuasaan.

Keterlibatan aktor dalam mendukung swasembada sangat diperlukan, hasil kajian yang dikemukakan oleh Ilham (2010), menyatakan bahwa upaya swasembada perlu dilakukan dan didukung oleh berbagai

pihak seperti peternak, swasta, institusi, DPR/DPRD, pemerintah pusat dan daerah baik lintas subsektor maupun departemen.

F. Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian, Paradigma Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian adalah penelitian kualitatif artinya realitas sosial yang terkait dengan aspek pengelolaan sapi potong akan dikonstruksi dengan mendeskriptifkan dan mengeksplorasi fenomena serta memahami makna-makna yang terkandung pada objek penelitian.

Penelitian Pengelolaan sapi potong berkelanjutan dalam perspektif ekologi politik dilakukan dengan pendekatan kualitatif dimana penelitian ini akan menjelaskan hubungan antar aktor yang saling berkontestasi, berinteraksi antar aktor.

Paradigma Penelitian

Penelitian Pengelolaan sapi Potong Berkelanjutan dalam perspektif Ekologi Politik menganut paradigma konstruktivisme. Menurut paradigma konstruktivisme, realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang.

B. Pengelolaan Peran Peneliti

Penelitian pengelolaan sapi potong berkelanjutan dalam perspektif ekologi politik melalui pendekatan kualitatif, maka peneliti akan berperan sebagai instrumen utama. Nasution (1988) *dalam* Sugiyono (2013), bahwa peneliti: (1) merupakan alat yang peka dan dapat bereaksi terhadap

segala stimulus dari lingkungan yang diperkirakannya bermakna atau tidak bagi peneliti, (2) sebagai alat yang dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus, (3) tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia, (4) suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita perlu sering melakukannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita, (5) sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkan, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan, untuk mentes hipotesis yang timbul seketika, (6) hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan, (7) dengan manusia sebagai instrumen, respon yang aneh, yang menyimpang justru diberi perhatian. Respon yang lain daripada yang lain, bahkan bertentangan dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan didaerah/kabupaten di Sulawesi Selatan berdasarkan kriteria geografis, berupa luas lahan dan populasi

ternak sapi. Hasil simulasi berdasarkan luas lahan dan jumlah populasi sapi, maka daerah yang mewakili lahan tinggi dan populasi tinggi adalah kabupaten Bone. Lahan tinggi populasi rendah diwakili oleh kabupaten Pinrang. Lahan rendah populasi tinggi diwakili oleh Kabupaten Gowa dan lahan rendah populasi rendah diwakili oleh Kabupaten Takalar.

D. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari informan yang terlibat langsung. Dalam pengumpulan data prinsip triangulasi pengumpulan data diperlukan, dalam arti suatu temuan penting tidak hanya diandalkan informasi pada satu sumber data tetapi beberapa sumber data sepanjang data yang dikumpulkan belum cukup.

Tabel 2. Informasi Sumber Data Dari Informan

No.	Aspek Yang Diteliti	Informasi Data	Sumber Data
1.	Pengelolaan sapi potong berkelanjutan	Keberlanjutan pengembangan ternak sapi dilihat secara multi kriteria	Aktor yang terlibat dalam pengelolaan sapi potong
2.	Peran aktor dalam pengelolaan sapi potong	Semua aktor yang terlibat dalam pengelolaan sapi potong Fungsi dan peran, Pola hubungan/ keterkaitan antar aktor, Power dan kepentingan aktor dalam pengelolaan sapi potong	Aktor yang terlibat dalam pengelolaan sapi potong
3.	Tipologi model pengelolaan sapi potong	Semua aktor yang terlibat dalam pengelolaan sapi potong baik yang terkonstruksi sebagai fenomena maupun yang tidak terkonstruksi sebagai realitas.	Kebijakan, Peraturan, UU, pola kerja aktor

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Sedangkan data sekunder adalah data yang diberikan secara tidak langsung atau melalui orang lain.

Pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan Triangulasi; teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan si peneliti melibatkan diri dalam kehidupan dari masyarakat yang diteliti untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada, sesuai maknanya dengan yang diberikan atau dipahami oleh para warga masyarakat yang ditelitinya. Termasuk dalam pengertian metode pengamatan terlibat adalah wawancara dan mendengarkan serta memahami apa yang didengarnya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian kualitatif belum memiliki pola yang jelas dalam teknik analisis data sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. Pendapat Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013), *“the most serious and central difficulty in the use of central difficulty in the use qualitative data is that methods of analysis are not well formulate”* (yang paling serius

dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah metode analisis belum dirumuskan dengan baik).

Analisis yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah analisis sebelum dilapangan dan setelah itu dianalisis kembali untuk penelitian lanjutan. Analisis Model Miles dan Huberman adalah data dianalisis pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsel Murat. 2009. *Ekologi Politik, Dimana Ekonominya?*. International Institute of Social Studies. Diakses tangga; 26 April 2014.
- Bernués, A, dkk. 2011. *Sustainability of pasture-based livestock farming systems in the European Mediterranean context: Synergies and trade-offs*. J. Livestock Science. Volume 139, Issues 1–2, July 2011, Pages 44–57.
- Blue Print. 2014. *Program Swasembada Daging Sapi 2014*. Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan.
- Boediyana Teguh. 2014. *Sekilas Tentang Peternakan Sapi Potong di Indonesia*. <http://fmp.sinarindo.co.id/index.php/8-teknologi-peternakan/14-sekilas-tentang-peternakan-sapi-potong-di-indonesia>. Diakses Tanggal 27 April 2014.
- Dirjen Peternakan dan BPS. 2011. Program Pendataan sapi potong, sapi perah dan kerbau (PSPK). Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Falahudin Irman. 2013. *Ekologi Politik Dalam Kearifan Budaya Lokal Terhadap pelestarian Alam*. <http://www.radenfatah.ac.id/artikel-158-ekologi-politik-dalam-kearifan-budaya-lokal-terhadap-pelestarian-alam.html>. Diakses tanggal 22 April 2014.
- González Gibrán Rivera, Cox Andrew M. and Zambada Ricardo Flores. 2012. *A human resources project implementation. An actor–network theory perspective*. Implementación de un proyecto de recursos humanos. Una perspectiva basada en la teoría del actor–red. *Contaduría y administración*. Print version ISSN 0186-1042. Contad. Adm vol.57 no.3 México July/Sept. 2012.
- Gow David D. 1987. *Sustainable development of fragile lands: The case of extensive livestock production in Africa*. Agricultural Administration and Extension, Volume 24, Issue 1, 1987, Pages 3-32.

- GRACE Communications Foundation. 2014. *Sustainable Livestock Husbandry*. <http://www.sustainabletable.org/248/sustainable-livestock-husbandry>. Diakses tanggal 27 April 2014.
- Ilham, N. 2006. *Analisis Sosial Ekonomi dan Strategi Pencapaian Swasembada Daging 2010*. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 4 No. 2 Juni 2006: 131-145.
- Kompas Com. 11 Pebruari, 2013. *Swasembada Sapi Amburadul*. News / Bisnis & Keuangan.
- Kusmarni Yani. 2008. *Teori Chaos; Sebuah Keteraturan Dalam Keacakan*. Universitas Pendidikan, Bandung.
- Nunes Breno, dkk. 2014. *Sustainable agricultural production: an investigation in Brazilian semi-arid livestock farms*. Journal of Cleaner Production. Volume 64, 1 February 2014, Pages 414–425.
- Peet, R. dan Watts, M.J. 1996. *Liberation ecologies: environment, development, social movements*. Routledge. P. 6.
- Pohan Y. Faulizar. 2011. *Teori Kompleksitas dan Perubahan Penggunaan Lahan*. <http://uchayuhm.blogspot.com/2011/12/teori-kompleksitas-dan-perubahan.html>. Diakses tanggal 24 April 2014.
- Robbins, Paul. 2012. *Political Ecology: A Critical Introduction*. Second Edition. Wiley-Blackwell Publishing. P. 14-15.
- Rohmad. 2011. *Pembangunan Peternakan berwawasan Agribisnis dan Berkelanjutan*. Makalah disampaikan pada Pelatihan di Desa Ngino Kecamatan Plemahan kabupaten Kediri. Hari Rabu, 9 Nopember 2011.
- Rudicahyo 2013. *Kompleksitas Kehidupan Berawal dari Logika Geometri*. <http://rudicahyo.com/psikologi-artikel/kompleksitas-kehidupan-berawal-dari-logika-geometri/>. Diakses tanggal 19 Mei 2014.

- SAI Platform Beef Working Group. 2013. *Principles for Sustainable Beef Farming*. Version 2013. <http://www.saiplatform.org/uploads/Modules/Library/sai-platform-principles-for-sustainable-beef-farming-final.pdf>. Diakses Tanggal 27 April 2014.
- Scholtz, MM, C. McManus, AM. Okeyo, A. Theunissen. 2011. *Opportunities for beef production in developing countries of the southern hemisphere*. J. Livestock Science, Volume 142, Issues 1–3, December 2011, Pages 195-202.
- Sefria. 2011. Sistem Kompleks. <http://sefria-fst08.web.unair.ac.id/artikel/detail-24374-Kuliah%20Simulasi%20Optik-sistem%20kompleks.html>. Diakses tanggal 27 April 2014.
- Situngkir Hokky. 2011. *Menuju Wawasan Kompleksitas untuk Memahami Narasi Kompleksitas Negeri*. Klub Sains Freeom Institute Seri Kompleksitas. Freedom Institute, Jakarta.
- Statistik Konsumsi Pangan. 2012. *Konsumsi Kelompok Daging*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2013. *Konsumsi*. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.
- Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2013. *Produksi dan Konsumsi*. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta, Bandung.
- Suyitman, Sutjahjo SH, Herison C, dan Muladno. 2009. *Status Keberlanjutan Wilayah Berbasis Peternakan di Kabupaten Situbondo untuk Pengembangan Kawasan Agropolitan*. Jurnal Agro Ekonomi. Volume 27 No.2, p. 165-191.

Syahyuti Buyung. 2013. Konsumsi daging Dunia.
<http://syahyutidaging.blogspot.com/>. Diakses tanggal 26 Juni 2014.

Udo. H.M.J. et., al 2011 Special Issue: *Assessment for Sustainable Development of Animal Production Systems*. J. Livestock Science. Volume 139, Issues 1–2, Pages 22–29.